

## Analisis Ketimpangan Wilayah Terhadap Wacana Pemekaran Wilayah Provinsi di Provinsi Jawa Timur

**Nazila Aisyadiva Ramadhani**

Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia  
Email: nazila.21068@mhs.unesa.ac.id

**Prayudi S Prabowo**

Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia  
Email: prayudiprabowo@unesa.ac.id

### Abstrak

*Pemekaran wilayah bisa menjadi salah satu pilihan yang berpotensi dapat mengurangi ketimpangan di suatu wilayah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis perubahan dari ketimpangan pada wilayah Provinsi Jawa Timur jika tidak mengalami dan mengalami pemekaran wilayah berdasarkan wacana pemekaran wilayah. Penelitian menggunakan periode dari tahun 2010-2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS). Data ini diolah menggunakan analisis Indeks Theil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan yang terjadi di seluruh kabupaten/kota mengalami perubahan jika terjadi pemekaran wilayah terutama pada wilayah hasil pemekaran wilayah dibandingkan dengan wilayah yang tidak mengalami pemekaran wilayah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemekaran wilayah dapat menjadi sebuah solusi dalam mengurangi dan mengatasi ketimpangan yang terjadi antar daerah. Oleh sebab itu, perlu diterapkan kebijakan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah sehingga dapat mengurangi ketimpangan antar wilayah.*

**Kata Kunci :** Ketimpangan Wilayah, Pemekaran Wilayah, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Theil

### Abstract

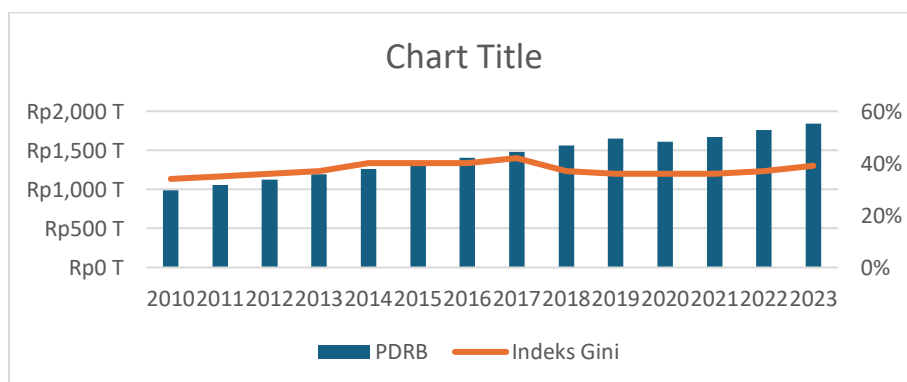
*Regional expansion can be one option that has the potential to reduce inequality in a region. This study was conducted with the aim of analyzing changes in inequality in the province of East Java if it did not undergo and underwent regional expansion based on the discourse of regional expansion. The study used the period from 2010 to 2023. This study uses a quantitative approach. The data used in this study are secondary data sourced from the Central Statistics Agency of East Java Province (BPS). This data was processed using Theil Index analysis. The results of the study indicate that the inequality occurring in all districts/cities undergoes changes if regional expansion occurs, particularly in the expanded regions compared to those that did not undergo regional expansion. The conclusion of this study is that regional expansion can be a solution to reduce and address inequality between regions. Therefore, policies that can enhance economic growth in a region should be implemented to reduce inequality between regions.*

**Keywords:** Regional Disparity, Regional Expansion, Economic Growth, Theil Index

## PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan penduduk dan pemulihan suatu system kelembagaan pada suatu periode di wilayah tertentu. Pembangunan ekonomi memiliki makna yang luas karena dapat memuat sebagian besar aspek yang ada di lingkungan masyarakat dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup pada lingkungan masyarakat. Menurut Todaro & Smith (2003) perkembangan pembangunan ekonomi bisa dilihat dari tiga nilai pokok, yaitu keahlian dalam memenuhi kebutuhan, peningkatan kedudukan masyarakat, dan kesempatan untuk memilih sebagai hak asasi manusia. Selain itu, pembangunan ekonomi dinilai sebagai kegiatan untuk menaikkan pendapatan per kapita. Hal ini dikarenakan peningkatan tersebut akan menambah pendapatan yang nantinya berdampak positif pada kesejahteraan ekonomi masyarakat (Arsyad, 2016).

Pada masa sekarang ini, salah satu masalah yang sering terjadi di berbagai daerah adalah mengenai ketimpangan pembangunan ekonomi dan kesenjangan pendapatan yang tidak metara di beberapa daerah. Dalam kutipan Iqbal et al. (2019) menurut Rustiadi (2009) bahwa pembangunan yang berfokus pada pertumbuhan makro dan tidak memperhatikan pada kesenjangan yang terjadi antarwilayah dapat menyebabkan investasi dan sumber daya yang ada hanya terserap dan terkelola di area perkotaan dan pusat perekonomian saja. Kejadian ini akan mengakibatkan permasalahan ketimpangan wilayah yang besar dan sulit untuk mewujudkan tingkat pembangunan yang ingin dicapai. Menurut Galbraith (2016), ketimpangan yang terjadi di suatu lingkungan dapat membentuk kehidupan dari suatu individu. Tetapi hal tersebut terkadang tidak dialami pada segelintir masyarakat yang memiliki kekuasaan dan kekayaan dan tidak dimiliki oleh pihak lainnya. Oleh karena itu, ketimpangan yang terjadi pada suatu lingkungan dapat menciptakan perselisihan dan persaingan yang ketat untuk mendapatkan kekuasaan serta kekayaan dan mengakibatkan setiap individu akan mendapatkan hasil yang berbeda berupa suatu keberhasilan atau kegagalan dalam hidupnya.



Sumber: Data Diolah (2025)

**Gambar 1 Ketimpangan Dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan Indeks Gini Provinsi Jawa Timur 2010-2023**

Ketimpangan antar wilayah di Provinsi Jawa Timur memiliki tingkat yang cukup tinggi. Hal ini terjadi dikarenakan PDRB pada wilayah Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan sedangkan Indeks Gini di wilayah Provinsi Jawa Timur

berfluktuasi setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur tidak merata dikarenakan perkembangan pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah yang berakibat pada tingginya ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Timur.

Dikarenakan permasalahan ketimpangan yang tidak dapat diselesaikan, banyak spekulasi yang beredar di masyarakat mengenai cara yang dapat menurunkan tingkat ketimpangan ekonomi. Salah satunya adalah tentang pemekaran wilayah baru. Menurut Hamri et al. (2016) pemekaran wilayah baru merupakan sebuah kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk membentuk provinsi, kabupaten, dan kota beserta system pemerintah daerah tersebut, yang bertujuan dapat membentuk dan menyeimbangkan pertumbuhan dan perkembangan pusat ekonomi sehingga dapat mendorong terjadinya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi pada wilayah yang ditetapkan dan daerah sekitarnya. Dan menurut Brata Kusumah yang dikutip oleh Yeheskel et al. (2017) pemekaran wilayah merupakan kebijakan yang memecahkan wilayah baik pada tingkatan kecil berupa wilayah kelurahan/desa, kabupaten/kota, hingga ke tingkat yang lebih besar berupa provinsi menjadi lebih dari satu wilayah sehingga memperluas jalur birokrasi masyarakat dengan pemerintah.

Pada beberapa tahun terakhir ini, terdapat sebuah pembicaraan dari masyarakat mengenai perencanaan pemekaran wilayah provinsi baru. Perencanaan pemekaran wilayah provinsi baru ini dikabarkan akan terjadi di daerah Pulau Jawa yaitu Jawa Timur. Jika kabar ini terjadi, maka pemekaran ini akan menjadi provinsi baru di Pulau Jawa setelah pemekaran Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Banten pada tahun 2000. Namun wacana ini masih dipertanyakan kebenarannya karena belum adanya undang-undang atau aturan resmi dari pemerintahan pusat yang menyatakan bahwa terdapat pembentukan provinsi baru di Jawa Timur (2024).

Adapun kabupaten dan kota yang akan bergabung ke provinsi baru yaitu:

1. Kabupaten Kediri
2. Kota Kediri
3. Kota Blitar
4. Kabupaten Blitar
5. Kabupaten Nganjuk
6. Kabupaten Trenggalek
7. Kabupaten Tulungagung
8. Kabupaten Madiun
9. Kota Madiun
10. Kabupaten Magetan
11. Kabupaten Pacitan
12. Kabupaten Ponorogo
13. Kabupaten Ngawi

Dengan berkurangnya kabupaten dan kota yang diatur oleh pemerintahan Provinsi Jawa Timur dapat mengurangi tekanan dan dapat memperhatikan secara teliti mengenai perkembangan pembangunan kabupaten dan kota. Hal ini memungkinkan ketimpangan ekonomi pada wilayah kabupaten dan kota tersebut dapat menurun dan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di daerah Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Baru.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif, di mana menggunakan data panel yang terdiri dari seluruh data PDRB Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur dan jumlah penduduk selama 14 tahun (2010–2023) yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dijadikan sampel, dengan Provinsi Jawa Timur sebagai populasi, serta teknik dokumentasi diterapkan sebagai metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang dipakai adalah *Theil Index*.

Indeks Theil adalah sebuah pengukuran untuk menghitung ketimpangan dari pendapatan dengan cara mengukur entropi dari ketidakmerataan antar wilayah tertentu. Analisis ini berasal dari seorang ekonom Belanda yaitu Henri Theil di tahun 1967. Menurut Soseco (2010) Indeks Theil sesuai dalam menganalisis kecenderungan dari segi geografis selama periode tertentu dengan tujuan memberikan penjelasan secara rinci mengenai ketimpangan spasial.

Adapun rumus dari Indeks Theil adalah sebagai berikut:

$$T^B = \sum_{i=1}^m \left\{ \left( \frac{p_i}{P} \right) * \left( \frac{y_i}{\mu} \right) * \ln \left( \frac{y_i}{\mu} \right) \right\}$$

Dimana:

$p_i$  = Jumlah penduduk di tingkat Kabupaten dan Kota

$P$  = Jumlah penduduk di tingkat Provinsi

$y_i$  = Pendapatan per kapita di tingkat Kabupaten dan Kota

$\mu$  = Pendapatan per kapita di tingkat Provinsi

$\ln$  = Algoritma alami

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Ketimpangan di Provinsi Jawa Timur jika Tidak Mengalami Pemekaran Wilayah

Analisis menggunakan Indeks Theil ini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan yang dialami di setiap wilayah berdasarkan data dari empat belas tahun lalu. Berikut merupakan hasil dari Indeks Theil Provinsi Jawa Timur jika tidak mengalami pemekaran wilayah provinsi meliputi 38 kabupaten dan kota.



Sumber: Data Diolah (2025)

**Gambar 2 Peta Ketimpangan Wilayah Provinsi Jawa Timur Jika Tidak Mengalami Pemekaran Wilayah**

Keterangan:

- = Wilayah yang berkontribusi pada dampak ketimpangan wilayah
- = Wilayah yang mendapatkan tekanan dari ketimpangan wilayah

Berdasarkan hasil peta, terdapat beberapa wilayah yang berwarna coklat dan berwarna kuning. Terdapat 10 wilayah dengan warna coklat yang menunjukkan bahwa wilayah itu merupakan wilayah yang memberikan kontribusi ketimpangan yang besar terhadap wilayah lainnya. Hal ini menyebabkan ketimpangan wilayah Provinsi Jawa Timur menjadi tinggi yang mengakibatkan wilayah lainnya mendapatkan tekanan ketimpangan sehingga wilayah tersebut menjadi kesulitan dalam pemerataan perekonomian antarwilayah dan mengalami tertinggal perekonomian di wilayah lainnya.

Penjelasan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh J. Galbraith & Choi (2020) yang menunjukkan bahwa salah satu wilayah dapat mempengaruhi kondisi wilayah lainnya. Kejadian ini sering terjadi pada beberapa negara dengan pendapatan menengah kebawah terutama negara berkembang seperti di Amerika Latin. Sedangkan negara yang memiliki rata-rata jumlah pendapatan tinggi, tidak akan berpengaruh terhadap wilayah lainnya karena di negara tersebut memiliki masyarakat yang makmur meskipun berada di kelas menengah.

Lalu terdapat penelitian dari J. K. Galbraith lainnya (2009) yang menyatakan bahwa wilayah Amerika Serikat memiliki tingkat ketimpangan wilayah yang tinggi dalam skala wilayah yang kecil seperti perkotaan. Sedangkan di dalam wilayah Eropa, tingkat ketimpangan yang terjadi di wilayah tersebut juga tinggi namun dalam skala wilayah yang besar seperti negara. Dengan ketimpangan yang terjadi di wilayah Eropa dapat menentukan permasalahan yang dialami oleh Eropa seperti pengangguran kronis yang mendorong adanya migrasi secara besar-besaran dan melemahkan standar ketenagakerjaan di tingkat nasional.

### Ketimpangan di Provinsi Jawa Timur jika Mengalami Pemekaran Wilayah Provinsi Induk




Analisis ini menggunakan Indeks Theil untuk mengukur tingkat ketimpangan wilayah di provinsi induk yang merupakan Provinsi Jawa Timur setelah mengalami pemekaran wilayah provinsi dengan data PDRB per kapita dan jumlah penduduk dari 25 wilayah Provinsi Jawa Timur. Berikut merupakan hasil dari Indeks Theil provinsi induk yang meliputi 25 kabupaten dan kota.



Sumber: Data Diolah (2025)

**Gambar 3 Peta Ketimpangan Wilayah Provinsi Induk Jika Provinsi Jawa Timur Mengalami Pemekaran Wilayah**

Keterangan:

-  = Wilayah yang berkontribusi pada dampak ketimpangan wilayah
-  = Wilayah yang mendapatkan tekanan dari ketimpangan wilayah
-  = Wilayah yang berpisah dari hasil pemekaran wilayah

Berdasarkan hasil analisis yang telah diterapkan ke dalam peta, dari 25 wilayah terdapat 8 wilayah dengan warna coklat yang menunjukkan bahwa wilayah itu merupakan wilayah yang memberikan kontribusi ketimpangan yang besar terhadap wilayah lainnya. Sedangkan 17 wilayah lainnya dengan warna kuning menunjukkan bahwa wilayah itu merupakan wilayah yang mendapatkan tekanan dari permasalahan ketimpangan yang berasal dari wilayah lainnya.

Lalu jika hasil ketimpangan wilayah di provinsi induk dibandingkan dengan hasil Provinsi Jawa Timur jika tidak mengalami pemekaran wilayah menunjukkan bahwa wilayah di provinsi induk tidak mengalami perubahan ketimpangan setelah mengalami pemekaran wilayah provinsi. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hariwan & Swaningrum (2015) bahwa pemekaran wilayah tidak menjamin adanya perubahan yang dapat menyelesaikan ketimpangan wilayah. Hal ini dikarenakan ketimpangan wilayah tidak hanya disebabkan dari permasalahan yang diakibatkan dari wilayah lain namun juga bisa berasal dari permasalahan di wilayah itu sendiri seperti kemiskinan, pengangguran, indeks pembangunan manusia, dan lain sebagainya.





provinsi baru meningkat yang membuat beberapa wilayah semakin tertinggal karena ketimpangan di provinsi baru tinggi.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Arianti & Cahyadinata (2016) bahwa bahwa setelah mengalami pemekaran wilayah, terdapat sebagian wilayah yang mengalami peningkatan dalam perekonomian di wilayahnya sendiri. Hal ini dikarenakan wilayah tersebut mendapatkan peluang secara besar dalam meningkatkan akselerasi pembangunan ekonomi serta mendapatkan hak yang dapat mengatur pemerintahannya sendiri, terutama di wilayah hasil pemekaran sebagai wilayah baru. Meskipun demikian, ketimpangan yang terjadi belum tentu dapat menurun karena pemekaran wilayah. Bahkan setelah mengalami pemekaran wilayah, terdapat beberapa daerah yang justru mengalami peningkatan dalam ketimpangan sehingga pemerintah daerah perlu tindakan lanjut dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

Lalu terdapat penelitian lainnya dari Kusmila et al. (2018) bahwa bahwa beberapa wilayah yang telah mengalami pemekaran wilayah hanya mengalami perubahan kecil dan perubahan itu berlangsung di beberapa tempat saja. Dan juga wilayah yang baru mengalami pemekaran wilayah biasanya belum mempunyai pengelolaan keuangan yang kuat sehingga memerlukan bantuan dari pemerintah pusat dalam mengatur keuangan di wilayahnya.

### **Perubahan Ketimpangan Pada Provinsi Jawa Timur jika Tidak Mengalami serta Mengalami Pemekaran Wilayah**

Perubahan ketimpangan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur jika tidak ada serta terdapat pemekaran wilayah menjelaskan bahwa terdapat perubahan ketimpangan pada wilayah provinsi baru yang merupakan hasil dari pemekaran wilayah provinsi dari Provinsi Jawa Timur. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Siregar (2019) bahwa pada periode awal terjadinya pemekaran wilayah, wilayah induk mengalami penurunan dalam perekonomian sedangkan wilayah baru cenderung meningkat. Hal ini dikarenakan perkembangan ekonomi pada wilayah pemekaran akan berfokus pada wilayah baru yang merupakan hasil pemekaran wilayah. Dan juga perekonomian di wilayah hasil pemekaran tidak terlalu kuat sehingga perlu mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat dalam mengatur perekonomian sampai wilayah tersebut dapat mengatur wilayahnya sendiri. Sedangkan di wilayah induk meskipun juga mengalami perubahan, perekonomian di wilayah tersebut tetap kuat dari masa sebelum pemekaran wilayah sehingga meskipun mengalami penurunan, perekonomian di wilayah induk tetap baik-baik saja.

Kemudian penelitian dari Furry & Sasana (2013) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada wilayah hasil dari pemekaran wilayah sering tidak stabil sehingga wilayah hasil pemekaran bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari wilayah induknya. Hal ini terjadi dikarenakan perubahan pertumbuhan ekonomi tidak disertai dengan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat yang tidak meningkat dapat menimbulkan beberapa permasalahan salah satunya pada tidak meratanya pendistribusian upah riil yang merambat ke permasalahan ketimpangan di wilayah tersebut.

Terdapat penelitian lainnya dari Hidayat (2017) yang menyatakan bahwa wilayah memiliki permasalahan yang berbeda akan merambat pada perbedaan pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah. Perbedaan permasalahan yang terjadi di beberapa wilayah mengakibatkan adanya perbedaan tingkat perekonomian di



wilayah tersebut tergantung dari seberapa berat permasalahan tersebut. Hal ini dapat memunculkan perbedaan pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah yang bisa merambat pada kesenjangan ekonomi di berbagai wilayah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Timur mengalami perubahan jika terdapat pemekaran wilayah provinsi. Perubahan ketimpangan ini dialami pada provinsi baru sedangkan provinsi induk tidak mengalami perubahan ketimpangan wilayah. Pada provinsi induk terdapat 8 wilayah yang memberikan kontribusi pada dampak ketimpangan wilayah. Dan pada provinsi baru terdapat 3 wilayah yang memberikan kontribusi pada dampak ketimpangan wilayah. Sedangkan wilayah sisanya baik di provinsi induk dan juga provinsi baru merupakan wilayah yang mendapatkan tekanan dampak dari permasalahan ketimpangan wilayah di provinsi baru. Perubahan yang terjadi di provinsi baru dialami oleh Kota Blitar yang berubah menjadi wilayah yang memberikan kontribusi dari ketimpangan wilayah setelah Provinsi Jawa Timur mengalami pemekaran wilayah provinsi. perubahan ini terjadi dikarenakan dampak dari perubahan kondisi yang disebabkan adanya pemekaran wilayah provinsi. Diharapkan pemerintah beserta masyarakat sadar akan pentingnya meningkatkan perekonomian terutama meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya masing-masing sehingga dapat mengurangi tingkat ketimpangan antarwilayah.

## REFERENSI

- Arianti, N. N., & Cahyadinata, I. (2016). KAJIAN DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP KESENJANGAN EKONOMI ANTAR DAERAH PESISIR DI PROVINSI BENGKULU. *Jurnal AGRISEP: Kajian Masalah Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 16(1), 27–36.
- Arsyad, L. (2016). *Ekonomi Pembangunan* (5th ed.). UPP STIM YKPN.
- Furry, R., & Sasana, H. (2013). EVALUASI DAMPAK PEMEKARAN DAERAH TERHADAP KINERJA EKONOMI DAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK DI KOTA SERANG. *DIPONEGORO JOURNAL OF ECONOMICS*, 2(3), 1–13. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jme>
- Galbraith, J. K. (2016). *Inequality: What everyone needs to know*. Oxford University Press.
- Hamri, E., Putri, E. I., Siregar, H. J., & Bratakusumah, D. S. (2016). PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA TASEK MALAYA (Regional Autonomy Policy and the Development of Central of Economic Growth of Tasikmalaya City). *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 7(1), 111–125.

- Hariwan, P., & Swaningrum, A. (2015). Analisis Indeks Pembangunan Manusia Pada 5 Wilayah Hasil Pemekaran di Jawa Barat. *JURNAL EKONOMI KUANTITATIF TERAPAN*, 8(1), 72–82.
- Hidayat, W. (2017). *Perencanaan pembangunan Daerah: Pendekatan pertumbuhan ekonomi, Disparitas pendapatan dan kemiskinan* . UMMPress.
- Iqbal, M., Rifin, A., & Juanda, B. (2019). ANALISIS PENGARUH INFRASTRUKTUR TERHADAP KETIMPANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI WILAYAH DI PROVINSI ACEH. *TATALOKA*, 21(1), 75–84.  
<https://doi.org/10.14710/tataloka.21.1.75-84>
- Kusmila, Z., Mukhzarudfa, & Yudi. (2018). ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DI PROVINSI JAMBI SEBELUM DAN SETELAH PEMEKARAN WILAYAH. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 27–39.
- Siregar, A. P. (2019). DAMPAK OTONOMI DAERAH DAN PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP PERKEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIA. *Berkala Ilmiah Agribisnis AGRIDEVINA*, 8(1), 58–71.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.33005/adv.v8i1.1602>
- Soseco, T. (2010). Perkiraan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia dengan Indeks Theil. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 2(2), 1–13.
- Todaro, M., & Smith, S. C. (2003). *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga* (Kedelapan). Erlangga .
- Wacana Pembentukan Provinsi Jawa Selatan: 13 Kabupaten dan Kota Siap Lepas dari Jawa Timur - Radar Jember. (2024, October 3). Jawa Pos.  
<https://radarjember.jawapos.com/nasional/795156527/wacana-pembentukan-provinsi-jawa-selatan-13-kabupaten-dan-kota-siap-lepas-dari-jawa-timur>
- Yeheskel, Idris, A., & Burhanudin. (2017). DAMPAK TERBENTUKNYA PROVINSI KALIMANTAN UTARA DALAM PEMBANGUNAN FISIK DI KABUPATEN BULUNGAN. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 5(4), 1483–1496.